

# ANALISIS KINERJA DAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Pada Empat Kabupaten di Pulau Madura)

Sutikno

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
Universitas Trunojoyo  
Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Madura

## ABSTRACT

*The Purpose of this study is aimed to know the economic growth profile of Madura according to the form and economic structure from it. And how its impact to the preferable sector with customized human resources and investation effectivity from it.*

*Based on Klassen Typology study, results that indicate : a) Kabupaten Bangkalan is associate as the region that has fast and quick growing. b) Kabupaten Sampang and Kabupaten Pamekasan are associate as the region that left behind, then c) Kabupaten Sumenep is associate as the most develop region but under pressure. In addition, as sectoral analysis applied, agriculture sectore has giving the biggest contribution to the PDRB(Product Domestic Regional Bruto) from mentioned 4 Kabupaten above.*

*Keywords : Performance, Development quality*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana profil pertumbuhan ekonomi pulau Madura jika dilihat dari pola dan struktur ekonomi dan sektor unggulan dan mengetahui pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pulau Madura selama ini diikuti pula dengan pemerataan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya serta efektivitas investasinya.*

*Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, pola pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura dapat diidentifikasi sebagai berikut: a) Kabupaten Bangkalan tergolong daerah "cepat maju dan cepat tumbuh"; b) Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan tergolong "daerah relatif tertinggal"; dan c) Kabupaten Sumenep tergolong "daerah maju tapi tertekan". Berdasarkan analisis sektoral, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB empat kabupaten yang ada di pulau Madura adalah sektor pertanian.*

*Kata Kunci : kinerja, kualitas pertumbuhan*

## PENDAHULUAN

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, seharusnya diikuti pula oleh perbaikan atau peningkatan aspek-aspek lain seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih

setara, kesetaraan gender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih bersih dan lestari, sistem hukum dan pengadilan yang lebih adil, kebebasan politik dan sipil yang lebih luas, kehidupan kultural

yang lebih kaya. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana proses pertumbuhan ekonomi mampu dipengaruhi sedemikian rupa sehingga dimensi *kualitatif* dari hasil pembangunan juga dapat lebih baik. Oleh sebab itu sangat diperlukan bagaimana mengkaji dinamika dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi di wilayah propinsi Jawa Timur.

Madura merupakan kepulauan yang secara administratif termasuk dalam

wilayah propinsi Jawa Timur. Pulau Madura secara administratif terbagi atas empat kabupaten. Empat kabupaten tersebut memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih besar (di atas rata-rata) dibanding kabupaten-kabupaten lain yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur. Berikut adalah kondisi kemiskinan di masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kategori 2, dan 3 Di Masing-Masing Kabupaten Yang Ada Di Pulau Madura**

No	Kabupaten	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	2006*)
1	Bangkalan	152,445	181,515	195,899	328,537	336,317
2	Sampang	338,700	427,663	333,984	624,120	508,140
3	Pamekasan	136,800	144,755	184,097	318,653	302,868
4	Sumenep	206,679	177,629	191,824	321,963	296,861

Sumber : BPS Jawa Timur, (2007)

Keterangan:

Kategori 2 = Penduduk miskin

Kategori 3 = Penduduk sangat miskin

Kondisi di atas menunjukkan empat kabupaten yang ada di pulau Madura mempunyai jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir ini. Gambaran ini mengisyarat bahwa proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pulau Madura kurang memperhatikan aspek-aspek kualitas seperti peningkatan kualitas masyarakatnya.

Selama ini gambaran mengenai Jawa Timur lebih banyak menyoroti aspek-aspek pembangunan di wilayah Jawa Timur daratan. Untuk pulau Madura nampak masih belum banyak penelitian dan kajian yang mendalam, khususnya yang menyangkut potensi dan struktur ekonominya. Oleh karena itu kajian-kajian

mengenai profil dan dinamika yang berkaitan dengan pertumbuhan dan proses pembangunan ekonomi di pulau Madura perlu untuk dilakukan.

Bertolak dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola dan struktur ekonomi tiap-tiap kabupaten yang ada di pulau Madura.
2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura diikuti pula oleh peningkatan kualitas sumber daya manusianya
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh

masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura diikuti pula oleh peningkatan daya beli masyarakatnya.

4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura diikuti pula oleh tingkat efisiensi investasi.

## TEORI

### Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya mencakup semua kegiatan pembangunan sektoral, regional dan khusus yang berlangsung di daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berbagai instansi sektoral, pemerintah maupun oleh anggota masyarakat. Menurut Blakely (1989), pembangunan ekonomi daerah adalah berkaitan dengan *suatu proses*, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi atau lembaga-lembaga baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Sementara itu, Arsyad (1999) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Ahmad (1993) mengemukakan bahwa bagi daerah, pembangunan ekonomi seyogyanya berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah secara luas melalui peningkatan konsumsi ber-

bagai barang dan jasa melalui penambahan produksi dan lapangan kerja yang memberikan kenaikan pendapatan masyarakat. Peningkatan produksi dan lapangan kerja itu sendiri hanya dapat dicapai jika ada investasi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat luas akan sangat tergantung dari besarnya sumber daya yang dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor produktif di daerah, dan apakah arah investasi yang menjadi pilihan dapat mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, masalah sumber dana investasi dan arah investasi menjadi dua isu utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam perspektif lain, Sukirno (1976) mengemukakan bahwa pengaruh yang paling nyata dalam pembangunan daerah terutama berasal dari pengeluaran pembangunan, karena pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat memperbesar jumlah prasarana yang tersedia, seperti jalan raya dan jembatan serta prasarana umum lainnya dan selanjutnya dapat menarik investor lebih banyak.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Blakely (1989) bahwa pembangunan daerah merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, *entrepreneurship*, transportasi, komunikasi, komposisi ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah pusat dan bantuan-bantuan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan dari pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan empat hal berikut (lihat: Baswir, 1997):

- ♦ Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini sejalan dengan

prinsip dasar pembangunan, yaitu dari rakyat, oleh dan untuk rakyat.

- ♦ Untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sumber daya daerah dan untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- ♦ Untuk meningkatkan dan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi antar daerah, termasuk dalam hal ini adalah penyalarsan pertumbuhan antar kota dan desa, serta antar sektor ekonomi.
- ♦ Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang masih tertinggal seperti kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya.

### **Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah**

Sampai saat ini belum ada suatu teori yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh. Hal ini dapat dipahami karena masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan atau karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal (daerah) (Blakely, 1989 dan Arsyad, 1999).

Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat digunakan untuk memahami arti pentingnya pembangunan ekonomi daerah, seperti teori ekonomi Neo-klasik, teori basis ekonomi, teori proses pertumbuhan daerah, teori basis ekspor, teori basis sumber daya, teori lokasi, teori tempat sentral dan teori pusat pertumbuhan (Glasson, 1974; Sukirno, 1976; Blakely, 1989 dan Arsyad, 1999).

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas

Robert Malthus dan John Staurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Menurut Ardani (1992), pada dasarnya teori-teori yang mengemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu pertama *inward looking* teori, menganalisis pertumbuhan yang diakibatkan oleh intern daerah itu sendiri. Kedua *outward oriented theory* yang menekankan pada mekanisme yang mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain. Kedua pendekatan ini dalam penerapannya antara satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi.

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan tripologi

Klassen sebagai alat analisis. Sjafrizal (1997) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu daerah pertumbuhan cepat (*rapid growth region*), daerah tertekan (*retarded region*), daerah sedang bertumbuh (*growing region*) dan daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*). Kuncoro dan Aswandi (2002) menggunakan alat analisis ini untuk mengklasifikasikan wilayah Propinsi Kalimantan Selatan menjadi ke dalam empat kelompok, yaitu (a) *low growth, high income*, (b) *high growth, high income*, (c) *high growth, low income*, dan (d) *low growth, low income*.

Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas

tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999).

### Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Dengan semakin kompleksnya permasalahan mengenai pembangunan daerah, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa teori pembangunan, khususnya teori pembangunan yang berkaitan dengan masalah pembangunan daerah, semakin ketinggalan dan terkadang tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru atau pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan (daerah) agar supaya proses pelaksanaan pembangunan tetap berjalan.

Tabel 2.1  
Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan Kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan sebagai pembangkit ekonomi

Sumber: Blakely, 1989

Berkaitan permasalahan tersebut di atas, Blakely (1989: 67-7) menyajikan suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan (daerah) dengan tujuan untuk membantu perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan yang ditawarkan oleh Blakely tersebut merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan tersebut merupakan dasar bagi kerangka

pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

### Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Seiring dengan telah bergulirnya era otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, maka kesempatan daerah untuk berkreasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pem-

bangunan di daerahnya berdasarkan karakteristik yang mereka miliki semakin besar. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sistem perencanaan pembangunan di tiap daerah akan cenderung berbeda, padahal pada sisi lain, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU No.32 2004) Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU No.33 2004) Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah dituntut untuk mengangkat perekonomian daerahnya dibandingkan dengan era sebelum pelaksanaan otonomi daerah, seperti pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, perbaikan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan sekaligus untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah.

Dalam kaitan ini, menurut Sjafrizal (2001), ada 9 strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat digunakan oleh daerah. Kesembilan strategi pembangunan ekonomi daerah tersebut adalah: Strategi pembangunan yang berbasis pada keuntungan kompetitif daerah; Pengembangan komoditi unggulan; Peningkatan kemampuan teknologi daerah; Peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah; Pengembangan kewirausahaan daerah; Pengembangan kawasan ekonomi terpadu; Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah; Pengembangan ekonomi kota; dan Pengembangan ekonomi desa.

## **METODE**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini melakukan analisis profil dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan proses pembangunan ekonomi kabupaten yang ada di pulau Madura. Secara administratif pulau

Madura dibagi menjadi empat kabupaten yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk menggambarkan profil dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh empat kabupaten yang ada di pulau Madura. Untuk mengetahui profil pertumbuhan ekonomi pulau Madura, sebagai indikator utama yang digunakan adalah PDRB. Dengan menganalisa PDRB akan diperoleh gambaran mengenai kemampuan pulau Madura dalam memproduksi barang dan jasa selama kurun waktu tertentu.

Selain melihat dinamika dan profil pertumbuhan ekonomi pulau Madura penelitian ini juga akan mengkaji aspek kualitas pertumbuhan ekonomi pulau Madura dalam kurun waktu tertentu. Aspek kualitas tersebut antara lain; Indeks pembangunan manusia (IPM), Indeks Daya Beli (IDB), dan tingkat efisiensi investasi (ICOR).

### **Alat Analisis**

Studi ini menggunakan beberapa metode analisis dalam menjawab tujuan yang akan dicapai. Alat analisis tersebut meliputi: Tipologi Klassen, Location Quotient (LQ), Shift-Share (S-S), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Daya Beli (IDB), dan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Struktur Dan Tipologi Pertumbuhan Ekonomi**

#### **Struktur Ekonomi**

Setelah melakukan perhitungan dan analisis kontribusi masing-masing sektor maupun kelompok sektor ekonomi terhadap total Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, maka dapat diperoleh gambaran struktur ekonomi masing-masing Kabupaten sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Struktur Ekonomi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep**

Kabupaten	Kontribusi Terbesar Thd PDRB		Kontribusi Terbesar Thd Kelompok Sektor			Struktur Ekonomi
	Sektor	Kelompok Sektor	Primer	Sekunder	Tersier	
Bangkalan	Pertanian	Primer	Pertanian	Bangunan	Jasa-jasa	T,P,S
Sampang	Pertanian	Primer	Pertanian	Bangunan	Jasa-jasa	P,T,S
Pamekasan	Jasa-jasa	Tersier	Pertanian	Bangunan	Jasa-jasa	T,P,S
Sumenep	Pertanian	Primer	Pertanian	Bangunan	Jasa-jasa	T,P,S

Keterangan: P = Sektor primer; S = Sektor Sekunder; T = Sektor tersier

Berdasarkan tabel di atas, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB empat kabupaten yang ada di pulau Madura adalah sektor pertanian. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor primadona atau leanding sektor di pulau Madura.

Namun apabila dilihat dari kontribusi berdasarkan kelompok sektor ekonomi, ternyata kelompok sektor tersier yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Madura, kemudian disusul oleh kelompok sektor primer dan sekunder, kecuali Kabupaten Sampang. Untuk Kabupaten Sampang sektor primer yang mendepati urutan pertama dan kemudian disusul oleh sektor tersier dan sekunder. Untuk Kabupaten Sampang, kelompok sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar adalah kelompok sektor ekonomi primer

Sektor pertanian, bangunan, serta jasa-kasa, merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kelompok sektornya masing-masing. Sementara

untuk Kabupaten Sumenep terdapat perbedaan pada kontribusi di kelompok sektor Sekunder. Pada kelompok sektor tersebut, kontribusi terbesar untuk Kabupaten Sumenep adalah sektor jasa-jasa. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa aktivitas perekonomian di pulau Madura cenderung bersifat homogen. Dengan kata lain aktivitas ekonomi di pulau Madura didominasi oleh ketiga sektor tersebut.

#### **Tipologi Kabupaten di Pulau Madura**

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebagai sumbu horisontal, daerah dalam hal ini kabupaten yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi/golongan, yaitu: kabupaten yang cepat maju dan

cepat tumbuh (*high growth and high income*), kabupaten maju tapi tertekan (*high income but low growth*), kabupaten yang berkembang cepat (*high growth but low income*), dan kabupaten yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Kuncoro dan Aswandi, 2002).

Kriteria yang digunakan untuk menggolongkan Kabupaten dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dari masing-

masing Kabupaten. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rata-rata total Pulau Madura.

Pertumbuhan PDRB dan perkembangan Pendapatan per Kapita Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep selama kurun waktu 2005 s/d 2007, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep**

No	Kabupaten/ Wilayah	Laju Pertumbuhan	Pendapatan per Kapita	Klasifikasi Wilayah
1	Pulau Madura	4.78	9,029,925.06	-
2	Bangkalan	5.40	9,145,271.53	Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
3	Sampang	4.74	8,171,625.78	Relatif Tertinggal
4	Pamekasan	4.68	7,594,184.88	Relatif Tertinggal
5	Sumenep	4.29	10,509,389.52	Daerah Maju Tapi Tertekan

Klasifikasi wilayah berdasarkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan dapat digambarkan dengan Tipologi Klassen, dapat dilihat seperti pada gambar 4.1

**Gambar 4.1**  
**Matrik Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep Menurut Analisis Tipologi Klassen**

Laju Pertumbuhan (r) \ PDRB per Kapita (y)	$y_i < y$	$y_i > y$
	$r_i > r$	Daerah Berkembang Cepat
$r_i < r$	Daerah Relatif Tertinggal  Kabupaten: Sampang Pamekasan	Daerah Maju Tapi Tertekan  Kabupaten Sumenep

Keterangan :

- ri = laju pertumbuhan PDRB Kabupaten  
i  
r = laju pertumbuhan total PDRB Pulau  
Madura  
yi = pendapatan perkapita Kabupaten i  
y = pendapatan perkapita Pulau  
Madura

Dengan Tipologi Klassen, Kabupaten yang ada di pulau Madura dapat diklasifikasi menjadi empat pola pertumbuhan (lihat gambar 4.1) yaitu: Kabupaten Sampang dan Pamekasan, merupakan Kabupaten yang tergolong "daerah relatif tertinggal". Ciri daerah yang mempunyai klasifikasi ini adalah daerah yang pertumbuhannya rendah dan pendapatan per kapitanya juga rendah, bila dibandingkan dengan pertumbuhan dan pendapatan per kapita pulau Madura. Kabupaten Bangkalan, merupakan Kabupaten yang tergolong pada pola pertumbuhan daerah "Cepat Maju dan cepat tumbuh", daerah ini adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan lebih besar dari pada pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi pulau Madura.

Sedangkan Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang tergolong "maju tapi tertekan". Daerah ini adalah daerah yang pendapatan per kapitanya lebih besar dari pendapatan per kapita pulau Madura, namun laju pertumbuhan PDRBnya lebih kecil dari laju pertumbuhan total PDRB Pulau Madura.

### Analisis Sektor Ekonomi Unggulan

Setelah mengetahui Struktur dan pola pertumbuhan Kabupaten di pulau Madura, maka analisis selanjutnya adalah mengetahui sektor-sektor unggulan yang ada di masing-masing kabupaten. Sebagai dasar untuk menentukan sektor-sektor unggulan yang ada di masing-masing kabupaten, alat analisis yang digunakan adalah analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis *Shift-Share (SS)*.

Berdasarkan hasil penilaian dari dua indikator tersebut, maka nilai maksimum yang mungkin diperoleh adalah 5 (empat) dan nilai minimumnya adalah 0 (nol). Kemudian berdasarkan rentang nilai terendah (minimum) dengan nilai tertinggi (maksimum) dibagi kedalam 5 (lima) kelas katagori yang menunjukkan tingkatan potensi dari sektor dan sub sektor yang sekaligus menunjukkan kemampuan potensi dari suatu sektor dan sub sektor dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah. Adapun ke-5 kelas atau kategori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sangat tinggi, dengan total nilai 5
2. Tinggi, dengan total nilai antara 4
3. Sedang, dengan rentang total nilai antara 3
4. Rendah, dengan rentang total nilai antara 2
5. Sangat rendah, dengan total nilai 0 - 1

Untuk mengetahui sektor dan sub sektor ekonomi yang mempunyai potensi atau strategis di pulau Madura selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

Total Nilai dan Kategori Sektor dan Sub Sektor Ekonomi Masing-Masing Kabupaten Di Pulau Madura

No	Sektor/Sub-sektor	Bangkalan		Sampang		Pamekaan		Sumenep	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
I	Pertanian	0	SR	2	R	0	SR	2	R
	1.1. Tanaman Bahan Makanan	2	R	2	R	1	SR	1	SR

	1.2. Tanaman Perkebunan	1	SR	0	SR	2	R	3	S
	1.3. Peternakan	2	R	3	S	3	S	0	SR
	1.4. Kehutanan	3	S	0	SR	0	SR	0	SR
	1.5. Perikanan	2	R	4	T	3	S	4	T
<b>II</b>	<b>Pertambangan &amp; Penggalian</b>	1	SR	1	SR	1	SR	2	R
	2.1. Pertambangan Migas	0	SR	0	SR	0	SR	2	R
	2.2. Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3. Penggalian	1	SR	0	SR	2	R	3	S
<b>III</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	2	R	1	SR	1	SR	2	R
	3.1. Makanan, Minuman, & Tembakau	1	SR	1	SR	2	R	2	R
	3.2. Tekstil, Kulit, & Alas Kaki	2	R	3	S	0	SR	0	SR
	3.3. Barang dari Kayu & Hasil Hutan Lain	1	SR	0	SR	2	R	2	R
	3.4. Kertas & Barang Cetakan	0	SR	4	T	0	SR	0	SR
	3.5. Pupuk Kimia & Barang dari Karet	3	S	0	SR	0	SR	0	SR
	3.6. Semen & Barang Galian Non Logam	1	SR	3	S	0	SR	2	R
	3.7. Logam Dasar Besi & Baja	4	T	0	SR	0	SR	0	SR
	3.8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatan	0	SR	1	SR	1	SR	3	S
	3.9. Barang-Barang Lainnya	5	ST	1	SR	2	R	0	SR
<b>IV</b>	<b>Listrik &amp; Air Bersih</b>	5	ST	1	SR	4	T	2	R
	4.1. Listrik	5	ST	1	SR	5	ST	2	R
	4.2. Air Bersih	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3. Gas	2	R	2	R	2	R	0	SR
<b>V</b>	<b>Bangunan</b>	0	SR	1	SR	3	S	1	SR
<b>VI</b>	<b>Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	4	T	0	SR	2	R	0	SR
	6.1. Perdagangan	4	T	0	SR	2	R	0	SR
	6.2. Hotel	2	R	0	SR	3	S	2	R
	6.3. Restoran	5	ST	1	SR	5	ST	1	SR
<b>VII</b>	<b>Pengangkutan &amp; Komunikasi</b>	2	R	1	SR	3	S	1	SR
	7.1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2. Angkutan Jalan Raya	3	S	1	SR	2	R	0	SR
	7.3. Angkutan Laut	3	S	0	SR	0	SR	2	R
	7.4. Angkutan Penyebrangan	2	R	0	SR	0	SR	0	SR
	7.5. Angkutan Udara	-	-	-	SR	-	SR	-	-
	7.6. Jasa Penunjang Angkutan	1	SR	3	S	4	T	3	S
	7.7. Pos dan Telekomunikasi	5	ST	2	R	3	S	3	S
	7.8. Jasa Penunjang Komunikasi	3	S	2	R	3	S	4	T
<b>VIII</b>	<b>Kuangan, Persewaan, &amp; Jasa Perus.</b>	1	SR	0	SR	3	S	2	R
	8.1. Bank	3	S	1	SR	3	S	2	R
	8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	S	0	SR	2	R	0	SR
	8.3. Jasa Penunjang Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.4. Sewa Bangunan	1	SR	0	SR	2	R	2	R
	8.5. Jasa Perusahaan	5	ST	1	SR	1	SR	4	T

IX	Jasa-Jasa	1	SR	0	SR	2	R	0	SR
	9.1. Pemerintahan Umum	3	S	0	SR	2	R	0	SR
	9.2. Sosial Kemasyarakatan	0	SR	2	R	3	S	0	SR
	9.3. Hiburan & Kebudayaan	2	R	0	SR	3	S	0	SR
	9.4. Perorangan & Rumah tangga	2	R	0	SR	2	R	2	R
Jumlah Sektor Kreteria Sangat Tinggi			1		0		0		0
Jumlah Sektor Kreteria Tinggi			1		0		1		0
Jumlah Sub Sektor Kreteria Sangat Tinggi			5		0		1		0
Jumlah Sub Sektor Kreteria Tinggi			2		2		1		3

Keterangan

ST= Sangat Tinggi, S= Sedang, SR= Sangat Rendah, T = Tinggi, R= Rendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya Kabupaten Bangkalan yang mempunyai sektor dengan kriteria sangat tinggi. Kabupaten Bangkalan mempunyai 1 sektor dengan kriteria sangat tinggi yaitu sektor Listrik & Air Bersih. Sementara apabila dilihat dari sub sektornya, ada dua kabupaten yang mempunyai sub sektor dengan kriteria sangat tinggi. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Bangkalan mempunyai 5 (lima) sub sektor dengan kriteria sangat tinggi, kelima sektor tersebut adalah: 1) Barang-Barang Lainnya, 2) Listrik, 3) Restoran, 4) Pos dan Telekomunikasi, dan 5) Jasa Perusahaan. Sedangkan Kabupaten Pamekasan hanya mempunyai 1 (satu) sub sektor dengan kriteria tersebut, yaitu sub sektor Listrik.

### Analisis Kualitas Pertumbuhan

Setelah mengetahui profil pertumbuhan ekonomi pulau Madura melalui Struktur dan pola pertumbuhan serta sektor unggulan di tiap kabupaten yang ada di pulau Madura, maka analisis selanjutnya adalah mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pulau Madura selama ini. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan analisis *Capital Output Ratio* (COR).

### Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil perhitungan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* pada tabel 5.15 dapat terlihat bahwa kategori IPM Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2005 sampai 2007 secara rata-rata sebesar 56,41. IPM yang sebesar tersebut dapat digolongkan pada kategori menengah bawah.

Tabel 4.4

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan

Tahun	Komponen IPM			Total	IPM	Kriteria
	IHH	IP	IDB			
2005	61.67	64.72	53.70	180.09	60.03	Menengah Bawah
2006	62.00	65.77	52.62	180.39	60.13	Menengah Bawah
2007	62.33	60.41	52.01	174.75	58.25	Menengah Bawah
Rata-rata	62.00	63.63	55.58	178.41	59.47	Menengah Bawah

Apabila dilihat dari komponen yang membangun IPM, menunjukkan bahwa komponen yang mempunyai nilai paling tinggi atau memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai IPM di Kabupaten Bangkalan adalah Indeks Pendidikan (IP). Nilai IP rata-rata Kabupaten Bangkalan sebesar 63,63. Berdasarkan data di atas Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan IPM pada tahun 2007, dimana pada tahun 2006 adalah sebesar 60.13 menjadi 58.25 pada tahun 2007. Menurunnya IPM pada tahun tersebut lebih disebabkan karena Indeks Daya Beli (IDB) atau suatu

indeks yang mengukur konsumsi riil per kapita masyarakat Bangkalan menurun sejak tahun 2005.

### Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil perhitungan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* pada tabel 5.16 dapat terlihat bahwa kategori IPM Kabupaten Sampang sejak tahun 2005 sampai 2007 secara rata-rata sebesar 53.59. Dengan mengacu pada standar UNDP, IPM sebesar tersebut dapat digolongkan pada kategori Menengah Bawah.

**Tabel 4.5**  
**Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang**

Tahun	Komponen IPM			Total	IPM	Kreteria
	IHH	IP	IDB			
2005	58.00	50.93	52.56	161.49	53.83	Menengah Bawah
2006	58.50	50.07	52.53	161.1	53.70	Menengah Bawah
2007	59.45	48.48	51.79	159.72	53.24	Menengah Bawah
<b>Rata-rata</b>	<b>58.83</b>	<b>49.83</b>	<b>52.29</b>	<b>160.77</b>	<b>53.59</b>	<b>Menengah Bawah</b>

Kondisi IPM di Kabupaten Sampang selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2007 cenderung mengalami penurunan. IPM tahun 2005 sebesar 53.83, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 53,70 dan berlanjut pada tahun 2007 menjadi 53.24. Namun kalau dilihat secara rata-rata selama kurun waktu tersebut Kabupaten Sampang IPMnya masih tergolong kategori Menengah Bawah.

### Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang mempunyai IPM paling besar setelah Kabupaten Sumenep di antara kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura. Berdasarkan hasil perhitungan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* pada tabel 5.17 dapat terlihat bahwa kategori IPM Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2005 sampai 2006 secara rata-rata sebesar 60.21. Dengan mengacu pada standar UNDP, IPM sebesar tersebut dapat digolongkan pada kategori menengah bawah.

**Tabel 4.6**  
**Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pamekasan**

Tahun	Komponen IPM			Total	IPM	Kreteria
	IHH	IP	IDB			
2005	62.00	65.06	53.09	180.15	60.05	Menengah Bawah
2006	62.42	64.41	53.20	180.03	60.01	Menengah Bawah
2007	62.83	66.22	52.69	181.74	60.58	Menengah Bawah
<b>Rata-rata</b>	<b>62.42</b>	<b>65.23</b>	<b>52.99</b>	<b>180.64</b>	<b>60.21</b>	<b>Menengah Bawah</b>

Hampir sama dengan kondisi kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura, ternyata Kabupaten Pamekasan juga mengalami penurunan IPM pada tahun 2006. Dan penurunannya pun disebabkan oleh faktor Indeks Pendidikan (IP) menurunnya Indeks Pendidikan (IP) masyarakat Kabupaten Pamekasan. IP Kabupaten Pamekasan pada tahun 2005 sebesar 65,06 sedangkan pada tahun 2006 menjadi 64,41. Namun pada tahun 2007, Indeks Pendidikan masyarakat Kabupaten Pamekasan

kembali mengalami kenaikan yaitu menjadi 66,69.

### Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang mempunyai IPM dengan tingkat fluktuasi yang tinggi diantara kabupaten lainnya yang ada di pulau Madura. Namun fluktuasi tersebut tidak sampai merubah kategori IPM Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 mempunyai IPM dengan kategori menengah bawah.

Tabel 4.7

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumenep

Tahun	Komponen IPM			Total	IPM	Kriteria
	IHH	IP	IDB			
2005	64.00	64.88	54.84	183.72	61.24	Menengah Bawah
2006	64.42	61.91	55.14	181.47	60.49	Menengah Bawah
2007	65.49	61.21	56.57	183.27	61.09	Menengah Bawah
<b>Rata-rata</b>	<b>64.64</b>	<b>62.67</b>	<b>55.52</b>	<b>182.82</b>	<b>60.94</b>	<b>Menengah Bawah</b>

Berdasar data di atas, ada hal yang berbeda pada kondisi Indeks Pendidikan (IP) Kabupaten Sumenep dibanding kabupaten lain yang ada di pulau Madura. IP pada kabupaten lain sejak tahun 2005 sampai 2007 selalu mengalami penurunan, namun Indeks Daya Beli (IDB) dalam waktu yang sama justru terjadi peningkatan. Kondisi ini tidak biasanya terjadi pada kabupaten lain, kalau kabupaten lain penurunan IPM disebabkan oleh menurunnya IDB.

### Analisis Efektifitas Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, tidak terkecuali pada perekonomian empat daerah kabupaten yang ada di Pulau Madura. Investasi merupakan salah satu sumberdaya pembangunan yang besar-kecilnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi suatu daerah. Namun selain

besar kecilnya, yang perlu diperhatikan dalam menilai investasi adalah tingkat efektifitasnya dalam menghasilkan produksi. Alat ukur atau analisis yang biasa dipakai untuk melihat efektif atau tidaknya investasi dalam suatu daerah adalah capital output ratio (COR). Berikut ini hasil analisis efektifitas investasi di empat kabupaten yang ada di pulau Madura dengan menggunakan analisis COR.

Tabel 4.8

Hasil Analisis Capital Output Ratio (COR)

No	Kabupaten	COR	
		2006	2007
1	Bangkalan	50.39	27.72
2	Sampang	2.48	2.58
3	Pamekasan	19.96	20.90
4	Sumenep	50.01	52.05
	<b>Rata-rata</b>	<b>30.71</b>	<b>25.81</b>

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa, secara rata-rata investasi pada tahun 2006 yang ditanamkan di Pulau Madura mampu menghasilkan 30,71 kali dari nilai uang yang diinvestasikan. Namun pada tahun 2007 pengembalian investasi atau hasil investasi di Pulau Madura mengalami penurunan yaitu menjadi 25.81 kali atau mengalami penurunan sebesar 12%.

Kabupaten yang mempunyai tingkat pengembalian investasi atau hasil investasi paling besar dalam dua tahun terakhir ini adalah Kabupaten Sumenep. Kabupaten Sumenep dalam dua tahun terakhir memberikan pengembalian investasi cukup besar yaitu sebesar 50.01 kali pada tahun 2006 dan mengalami peningkatan menjadi 52.05 kali pada tahun 2007. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah ini mempunyai efektivitas investasi paling tinggi dibanding tiga daerah kabupaten lainnya yang ada di Pulau Madura. Hal ini nantinya akan menjadikan daerah Kabupaten Sumenep sebagai daerah yang mempunyai peluang investasi paling tinggi dibanding tiga daerah kabupaten yang lainnya.

Kabupaten yang mempunyai tingkat pengembalian investasi atau hasil investasi paling rendah dalam dua tahun terakhir ini adalah Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang dalam dua tahun terakhir memberikan pengembalian investasi cukup kecil yaitu hanya sebesar 2.48 kali pada tahun 2006 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 2.58 kali pada tahun 2007. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah ini mempunyai efektivitas investasi paling rendah dibanding tiga daerah kabupaten lainnya yang ada di Pulau Madura. Hal ini nantinya akan menjadikan daerah Kabupaten Sampang sebagai daerah yang sulit untuk menarik investor dibanding tiga daerah kabupaten yang lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura, maka ditemukan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, pola pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten yang ada di pulau Madura dapat diidentifikasi sebagai berikut: a) Kabupaten Banglan tergolong daerah "cepat maju dan cepat tumbuh"; b) Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan tergolong "daerah relatif tertinggal"; dan c) Kabupaten Sumenep tergolong "daerah maju tapi tertekan".
2. Berdasarkan analisis sektoral, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB empat kabupaten yang ada di pulau Madura adalah sektor pertanian. Namun apabila dilihat dari kontribusi berdasarkan kelompok sektor ekonomi, ternyata kelompok sektor tersier yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Madura, kemudian disusul oleh kelompok sektor primer dan sekunder
3. Kabupaten yang paling banyak mempunyai sektor unggulan (dengan kriteria sangat tinggi dan tinggi) adalah Kabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 7 sub sektor unggulan, kemudian disusul oleh Kabupaten Sumenep dengan 3 sub sektor unggulan, sedangkan Kabupaten Sampang dan Pamekasan masing-masing hanya mempunyai 2 sub sektor unggulan.
4. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pulau Madura selama kurun waktu 2003-2007 belum diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Hal tersebut terlihat dari hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten yang ada di Pulau Madura masih tergolong pada kriteria "menengah bawah" berdasarkan standar UNDP.

5. Selama kurun waktu 2006-2007, secara rata-rata investasi pada tahun 2006 yang ditanamkan di Pulau Madura mampu menghasilkan 30,71 kali dari nilai uang yang diinvestasikan. Kabupaten yang mempunyai tingkat pengembalian investasi atau hasil investasi paling besar dalam dua tahun terakhir ini adalah Kabupaten Sumenep.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran-saran yang diharapkan bisa menjadi masukan dalam menyempurnakan kebijakan wilayah pengembangan di pulau Madura, antara lain:

1. Sektor Pertanian, merupakan sektor unggulan di setiap kabupaten di pulau Madura. Jadi langkah yang paling urgen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten tersebut adalah menyediakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian.
2. Kabupaten-kabupaten yang ada di pulau Madura mempunyai sektor unggulan yang relatif sedikit, sehingga membutuhkan kebijakan pemerintah untuk terus mengali potensi-potensi sektor ekonomi yang ada di pulau Madura. Dalam upaya menggali potensi tersebut perlu melakukan kerjasama dengan berbagai badan atau perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya dalam bentuk riset dan

pengembangan untuk mencari alternatif-alternatif pertumbuhan masing-masing kabupaten yang tertinggal.

3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten yang ada di pulau Madura dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, mengacu pada konsep pertumbuhan wilayah dengan mempertimbangkan potensi sektor ekonomi dan daya saing wilayah. Sehingga tiap kabupaten mempunyai kekhasan daerah masing-masing berdasarkan potensi yang ada.
4. Dalam upaya melakukan proses pembangunan ekonomi, sebaiknya pulau Madura tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi saja, tapi harus diimbangi pula oleh tingkat pemerataan dan perbaikan kualitas sumber daya manusiannya. Hal tersebut bisa ditempuh dengan cara penyediaan fasilitas-fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti sarana pendidikan dan kesehatan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Piter, Armida S. Alisjahbana, Nurry Effendy dan Boediono (2002), *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo (1989), *Beberapa Dimensi Ekonomi Regional*, Fakultas Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Ahmad, Mubariq (1993), "Irian Jaya dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLI, No. 4: 441-459.
- Arsyad, Lincolin (1999), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.

- Baswir, Revrisond (1997), "Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, Juli: 24-32.
- Blakely, Edward J. (1989), *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, Sage Library of Social Research 168, Sage Publication.
- Kuncoro, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. (1st ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sjafrizal (1997), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat", *Prisma*, No. 3, Maret: 27-38.
- — — — (2001), "Strategi dan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi", *Jurnal Penelitian Andalas*, Edisi Sosial-Ekonomi, Tahun XIII, No. 36, September: 1-26.
- Soepono, Parasetyo (1993), "Analisis Shift-Share: Perkembangan dan Penerapannya", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Tahun VIII, No. 1: 43-53.
- Sukirno, Sadono (1976), *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tulus, Tambunan (2000), *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran: Teori dan Temuan Empiris*, Cetakan Pertama, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Vinod Thomas, Mansoor Dailami, dkk, (2000), *The Quality of Growth*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yusuf, Maulana (1999), "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLVII, No. 2: 219-233.
- Yuwono, Prapto (1999), "Penentuan Sektor Unggulan Daerah Menghadapi Implementasi UU 22/1999 dan UU 25/1999", *Kritis*, Vol. XII, No. 2, November: 41-62.